



**PEMERINTAH  
KOTA TANJUNGPINANG**

# **RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2019**

**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan**



# DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                       | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>ii</b> |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>                                  | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....   | 1         |
| B. Maksud dan Tujuan.....   | 1         |
| C. Tugas Pokok dan Fungsi .....                                   | 2         |
| D. Struktur Organisasi .....                                      | 2         |
| E. Sistematika Penulisan .....                                    | 5         |
| <b>BAB II    RENCANA STRATEGIS.....</b>                           | <b>6</b>  |
| <b>BAB III    RENCANA KERJA.....</b>                              | <b>8</b>  |
| A. Rencana Target Kinerja.....                                    | 8         |
| B. Rencana Kerja dan Indikasi Pendanaan Kegiatan Tahun 2019 ..... | 9         |
| <b>BAB IV    PENUTUP .....</b>                                    | <b>14</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legilemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyeleggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No.22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU 32 Tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean Government), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2019 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

### B. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang Tahun 2019 dimaksudkan untuk dapat

meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan good governance, disamping itu sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk Tahun 2019. Sedangkan tujuan penyusunan RKT ini antara lain adalah :

1. Tersusunnya instrumen pengukuran perencanaan pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang.
2. Merencanakan target yang ingin dicapai di Tahun 2019 serta dana yang dibutuhkan sebagai pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang guna menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang

### **C. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang serta Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 53 Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Sedangkan fungsi Bappelitbang Kota tanjungpinang adalah sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
2. pengoordinasian, penyusunan dan perencanaan pembangunan daerah;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. pengoordinasian dan melaksanakan penelitian dan pengembangan yang mendukung pembangunan daerah; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**D. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang terdiri dari:

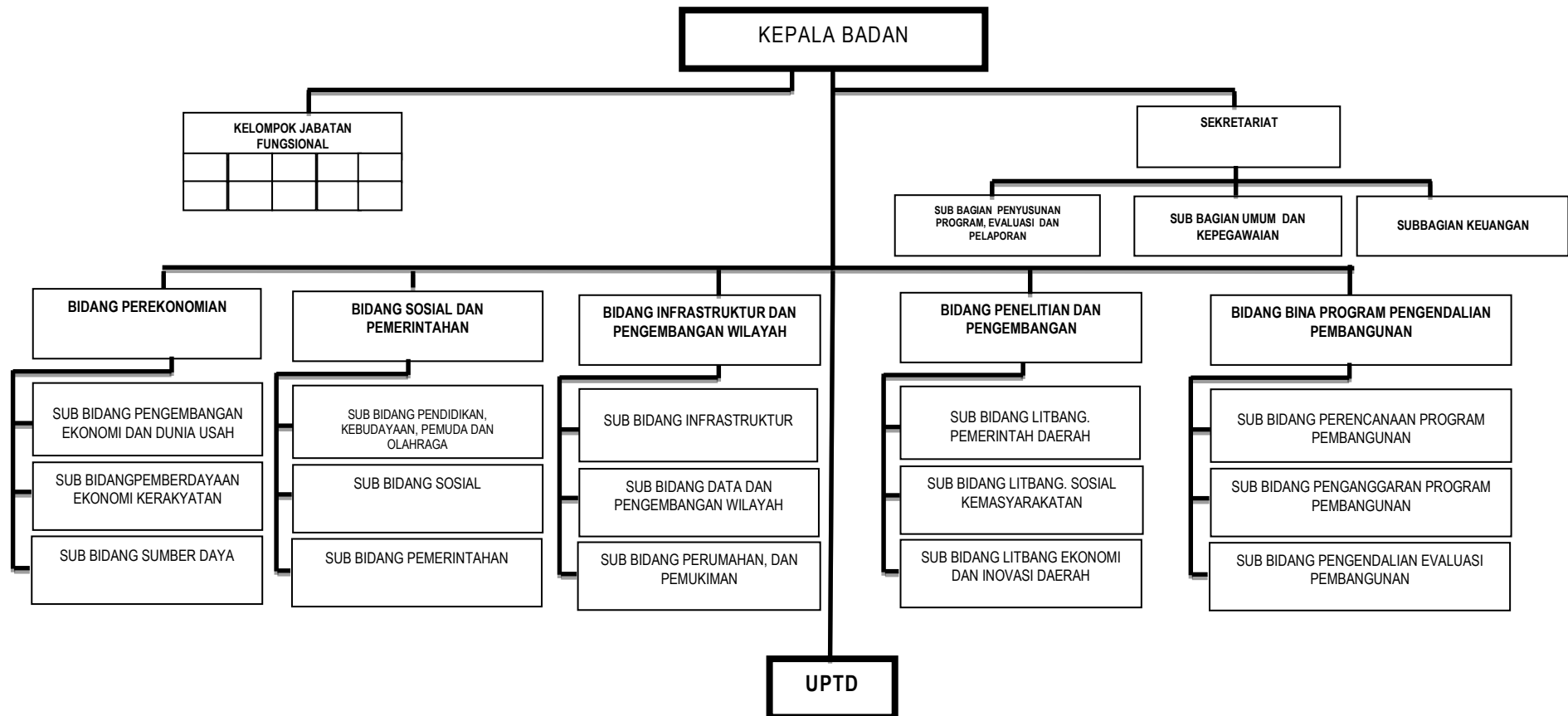
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Perekonomian
4. Bidang Sosial dan Pemerintahan
5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan
7. Bidang Bina Program dan Pengendalian
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang adalah sebagaimana gambar di bawah ini :



## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

### BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TANJUNGPINANG



**E. Sistematika Penulisan**

Pada dasarnya Rencana Kerja Tahunan ini memberikan penjelasan mengenai rencana target kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang selama Tahun 2019. Sistematika penyajian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang Tahun 2019, sebagai berikut:

- Bab I    Pendahuluan**                               menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi.
- Bab II    Rencana Strategis**                       menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang meliputi Rancangan Awal Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang 2018-2023.
- Bab III   Rencana Kerja 2019**                       menjelaskan rencana target pencapaian kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2019.
- Bab IV    Penutup**                                   menjelaskan simpulan menyeluruh dari Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang Tahun 2019.



## BAB II

# RENCANA STRATEGIS

Tahun 2018 merupakan periode akhir Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang Tahun 2013-2018, oleh karenanya penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappelitbang Tahun 2019 masih menggunakan rancangan awal Renstra Bappelitbang 2018-2023. Didalam rancangan awal rencana strategis ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat tujuan dan sasaran. Adapun rencana penetapan tujuan, sasaran untuk setiap tahunnya selama lima tahun kedepan, dapat dilihat pada table 2.1 berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappelitbang Kota Tanjungpinang**

| TUJUAN   | SASARAN  | INDIKATOR SASARAN  | SATUAN | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE - |      |      |      |      |      |
|--|--|--|--------|--------------------------------|------|------|------|------|------|
|  |  |  |        | 2018                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| (1)  | (2)  | (3)  | (4)    | (5)                            | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  | (10) |
| 1 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah | 1 Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah | Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPDP           | %      | 80                             | 80   | 82   | 84   | 86   | 88   |
|  |  | Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan RKPDP kedalam APBD   | %      | 80                             | 80   | 82   | 84   | 86   | 88   |
|  |  | Persentase penyusunan dokumen perencanaan daerah tepat waktu | %      | 100                            | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|  | 2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan        | Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD      | %      | 75                             | 75   | 76   | 76   | 77   | 78   |

|  |   |  |       |     |     |     |     |     |     |
|--|---|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas                | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sektoral                               | %     | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 4 Meningkatkan pelaksanaan program pembangunan sesuai perencanaan                                       | Persentase capaian pelaksanaan pembangunan   | %     | 85  | 85  | 85  | 90  | 90  | 90  |
|  |   | Persentase penyusunan dokumen pelaporan daerah tepat waktu                         | %     | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 5 Meningkatkan kualitas SDM aparatur perencana  | Hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah  | Nilai | A   | A   | A   | A   | A   | A   |
|  | 6 Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan                                      | Persentase ketersediaan data pembangunan daerah melalui aplikasi SIPD              | %     | 70  | 75  | 77  | 80  | 82  | 85  |
| 2 Meningkatkan kualitas Kelitbangan Daerah | 1 Meningkatkan pemanfaatan hasil kajian, penelitian dan pengembangan dalam pengambilan kebijakan daerah | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan daerah dalam pengambilan kebijakan daerah | %     | 60  | 60  | 60  | 65  | 65  | 65  |

## BAB III

# RENCANA KERJA

### A. Rencana Target Kinerja

Pencapaian kinerja 2018 memberikan kepercayaan diri dalam menentukan target di tahun 2019. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Target Kinerja di tahun 2019 seperti yang di tampilkan pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Target Rencana Kinerja Bappelitbang Kota Tanjungpinang**  
**Tahun 2019**

| TUJUAN   | SASARAN  | INDIKATOR SASARAN  | SATUAN | TARGET |
|--|--|--|--------|--------|
| 1 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah             | 1 Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah                             | Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPd            | %      | 80     |
|  |  | Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan RKPd kedalam APBD    | %      | 80     |
|  |  | Persentase penyusunan dokumen perencanaan daerah tepat waktu | %      | 100    |
|  | 2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan                                    | Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD      | %      | 75     |
|  | 3 Meningkatkan ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sektoral         | %      | 100    |
|  | 4 Meningkatkan pelaksanaan program pembangunan sesuai perencanaan                          | Persentase capaian pelaksanaan pembangunan                   | %      | 80     |
|  |  | Persentase penyusunan dokumen pelaporan daerah tepat waktu   | %      | 100    |
|  | 5 Meningkatkan kualitas SDM aparatur perencana   | Hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah                        | Nilai  | A      |
| 6 Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan | Persentase ketersediaan data pembangunan daerah melalui aplikasi SIPD                      | %  | 75     |        |

|   |  |   |   |  |   |    |
|---|--|---|---|--|---|----|
| 2 | Meningkatnya kualitas Kelitbangan Daerah | 1 | Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian, penelitian dan pengembangan dalam pengambilan kebijakan daerah | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan daerah dalam pengambilan kebijakan daerah | % | 60 |
|---|--|---|---|--|---|----|

**B. Rencana Kerja dan Indikasi Pendanaan Kegiatan Tahun 2019**

Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2019 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan oleh rancangan awal RPJMD Kota Tanjungpinang 2018-2023. Pencapaian rencana target kerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan di tahun 2019. Pendanaan Bappelitbang pada tahun 2019 adalah sejumlah Rp. 12.334,335.500- (Dua belas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai beberapa program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2019 seperti disampaikan pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2**  
**RENCANA KERJA TAHUNAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2019**

| No  | Sasaran  | Indikator Sasaran   | Target | Urusan/ Program/ Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Target     | Pagu (Rp.)  | Ket |
|-----|--|---|--------|--|--|------------|-------------|-----|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)    | (5)  | (6)  | (7)        | (8)         | (9) |
| 1.  | Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1. Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD                      | 85%    | <b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>  |  |            |             |     |
|     |  |   |        | 1. Penyusunan Ranperda Tentang RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018 - 2023  | Jumlah Ranperda Tentang RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018 - 2023   | 1 dok      | 104.650.000 |     |
|     |  |   |        | 2. Penyusunan Rancangan RKPD dan RKPD Perubahan  | Jumlah Dokumen Rancangan RKPD dan RKPD Perubahan   | 1 dok      | 232.600.000 |     |
|     |  | 2. Konsistensi Penjabaran Program/ Kegiatan RKPD kedalam APBD             | 85%    | <b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>  |  |            |             |     |
|     |  |   |        | 1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan                           | Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan                                      | 4 dok      | 252.160.000 |     |
|     |  |   |        | 2. Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (E-Planning)   | Jumlah aplikasi e-Planning   | 1 Aplikasi | 211.850.000 |     |
|     |  | 3. Persentase penyusunan dokumen perencanaan strategis daerah tepat waktu | 100%   | <b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>  |  |            |             |     |
|     |  |   |        | 1. Sinkronisasi Kebijakan dan Peningkatan Pembangunan Daerah Yang Terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Pusat | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Kebijakan dan Peningkatan Pembangunan Daerah Yang Terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Pusat | 1 dok      | 307.390.000 |     |

|    |  |   |     |   |   |       |             |  |
|----|--|---|-----|---|---|-------|-------------|--|
|    |  |   |     | 2. Koordinasi Kebijakan dan Kinerja Pemerintah Daerah Serta Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Koordinasi Kebijakan dan Kinerja Pemerintah Daerah Serta Program Pembangunan | 1 dok | 375.730.000 |  |
|    |  |   |     | 3. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Kota Tanjungpinang                         | Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Kota Tanjungpinang                                    | 1 dok | 34.930.000  |  |
| 2. | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan                                    | Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD | 75% | <b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                                   |   |       |             |  |
|    |  |   |     | 1. Penyelenggaraan musrenbang RKPD  | Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RKPD Hasil Kesepakatan Akhir RKPD                            | 1 dok | 519.245.000 |  |
|    |  |   |     | 2. Penyelenggaraan Forum OPD Kota Tanjungpinang                                 | Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RKPD Hasil Kesepakatan Akhir RKPD                            | 1 dok | 110.580.000 |  |
| 3. | Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sektoral    |     | <b>Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan</b>                  |   |       |             |  |
|    |  |   |     | 1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan pemerintahan            | Jumlah Dokumen Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan pemerintahan            | 1 dok | 476.580.000 |  |
|    |  |   |     | 2. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Tanjungpinang       | Jumlah Dokumen Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Tanjungpinang       | 1 dok | 509.690.000 |  |
|    |  |   |     | 3. Pemutakhiran Database Kesejahteraan Sosial Kota Tanjungpinang                | Jumlah Dokumen Pemutakhiran Database Kesejahteraan Sosial Kota Tanjungpinang                | 1 dok | 449.450.000 |  |
|    |  |   |     | <b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>                                  |   |       |             |  |
|    |  |   |     | 1. Peningkatan Koordinasi Bidang Perencanaan Ekonomi                            | Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Perencanaan Ekonomi  | 1 dok | 321,000,000 |  |
|    |  |   |     | 2. Pendampingan Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Tanjungpinang                | Jumlah Dokumen Pendampingan Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Tanjungpinang                | 1 dok | 402,000,000 |  |

|    |   |   |   |  |   |                 |             |  |  |
|----|---|---|---|--|---|-----------------|-------------|--|--|
|    |   |   | 3.  | Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro Kota Tanjungpinang                       | Jumlah Dokumen Kerangka Ekonomi Makro Kota Tanjungpinang                                  | 1 dok           | 281,913,000 |  |  |
|    |   |   | <b>Program Perencanaan Pembangunan Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>        |  |   |                 |             |  |  |
|    |   |   | 1.  | Pengembangan Sistem Informasi Pengembangan Wilayah Berbasis web GIS        | Jumlah Updating Data Sistem Informasi Pengembangan Wilayah Berbasis web GIS               | 3 Kelompok Data | 203,300,000 |  |  |
|    |   |   | 2.  | Koordinasi Penanganan Perumahan dan Kawasan Kumuh                          | Jumlah Dokumen Koordinasi Penanganan Perumahan dan Kawasan Kumuh                          | 1 dok           | 308,500,000 |  |  |
|    |   |   | 3.  | Pembaharuan Peta Dasar   | Jumlah Dokumen Peta Dasar   | 1 dok           | 476,500,000 |  |  |
|    |   |   | 4.  | Fasilitasi Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka Tanjungpinang      | Jumlah Dokumen Fasilitasi Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka Tanjungpinang      | 1 dok           | 308,400,000 |  |  |
|    |   |   | 5.  | Koordinasi Kegiatan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)    | Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)    | 1 dok           | 491,077,500 |  |  |
|    |   |   | 6.  | Peningkatan Koordinasi Bidang Insfrastuktur dan Pengembangan Wilayah       | Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Insfrastuktur dan Pengembangan Wilayah                   | 1 dok           | 517,795,000 |  |  |
|    |   |   | 7.  | Koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Tanjungpinang | Jumlah Dokumen Koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Tanjungpinang | 1 dok           | 909,800,000 |  |  |
| 4. | Meningkatnya pelaksanaan program pembangunan sesuai perencanaan | 1. Persentase capaian pelaksanaan pembangunan | <b>Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>                           |  |   |                 |             |  |  |
|    |   |   |   | Evaluasi RKP Kota Tanjungpinang Tahun 2019                                 | Jumlah Dokumen Evaluasi RKP Kota Tanjungpinang Tahun 2019                                 | 1 dok           | 190.085.000 |  |  |
|    |   |   | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |  |   |                 |             |  |  |
|    |   |   |   | Perencanaan. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | Perencanaan. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah                | 1 dok           | 50.000.000  |  |  |

|   |  |   |  |   |   |                |               |
|---|--|---|--|---|---|----------------|---------------|
|   |  | 2. Persentase penyusunan dokumen pelaporan daerah tepat waktu |  | <b>Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>                                 |   |                |               |
|   |  |   |  | Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)                                     | Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)   | 1 dok          | 205.400.000   |
| Meningkatnya kualitas SDM aparatur perencana  | Hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah  |   |  | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |   |                |               |
|   |  |   |  | 1. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung   | Jumlah Tenaga Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 30 Orang       | 648,150,000   |
|   |  |   |  | 2. Operasional Rutin Kantor   | Jumlah ASN Bappelitbang yang mendapatkan pelayanan  | 75 Orang       | 1,837,900,000 |
|   |  |   |  | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                    |   |                |               |
|   |  |   |  | 1. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor  | Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/berat  | 1 gedung       | 195.000.000   |
| Meningkatnya kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan                                      | Persentase ketersediaan data pembangunan daerah melalui aplikasi SIPD            |   |  | <b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>                                 |   |                |               |
|   |  |   |  | 1. Dukungan Tim Sistem Informasi Pembangunan Daerah   | Persentase updating konten data aplikasi SIPD   | 100 %          | 154,400,000   |
| Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian, penelitian dan pengembangan dalam pengambilan kebijakan daerah | Persentase pemanfaatan hasil kelitbang daerah dalam pengambilan kebijakan daerah |   |  | <b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>   |   |                |               |
|   |  |   |  | 1. Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Penelitian dan Pengembangan di Kota Tanjungpinang | Jumlah dokumen Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Penelitian dan Pengembangan di Kota Tanjungpinang | 1 dok          | 712.060.000   |
|   |  |   |  | 2. Lomba Karya Tulis Ilmiah   | Jumlah Karya tulis ilmiah yang diperlombakan  | 20 Karya tulis | 240.150.000   |
|   |  |   |  | 3. Kajian Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Tanjungpinang                            | Jumlah Dokumen Kajian Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Tanjungpinang                            | 1 dok          | 296.250.000   |



## BAB IV

# PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target kerja yang hendak dicapai ditahun rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Bappelitbang Kota Tanjungpinang menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019. Dalam RKT tersebut diuraikan target Bappelitbang Kota Tanjungpinang di tahun 2019 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

Ditahun 2019 Bappelitbang Kota Tanjungpinang merencanakan beberapa target berdasarkan rancangan awal Rencana Strategis (RENSTRA) Bappelitbang Kota Tanjungpinang 2018-2023. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kerja yang ditentukan di tahun 2019 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Bappelitbang Kota Tanjungpinang mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan dimasa yang akan datang.

Pencapaian target rencana kerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan di tahun 2019. Kebutuhan pendanaan Bappelitbang Kota Tanjungpinang 2019 adalah sejumlah Rp. 12.334,335.500- (Dua belas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).